



Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Berbasis Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bintan

Lili Pranola

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Fitri Kurnianingsih

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Ramadhani Setiawan

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi Penulis: lilipranola44@gmail.com

Abstract. *Bintan Regency has abundant marine and fishery potential because most of its territory is the ocean. Micro enterprises with the type of marine fisheries are in third place after culinary and retail in this district. However, there are still some problems in developing marine and fisheries potential based micro enterprises in Binan Regency, including the lack of digital marketing implementation for micro business actors. This study aims to find out how DKUPP is strategy is in developing marine and fisheries potential based micro enterprises in Bintan Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Research results (1) On the indicators of creating a good business climate, DKUPP Bintan Regency has implemented several practices or programs in order to develop micro enterprises, especially those based on marine and fisheries potential in Bintan Regency. (2) In producing integrated information, DKUPP Bintan Regency disseminated all information to micro entrepreneurs in Bintan Regency through Whatsapp Gropus, Instagram social media, radio broadcast and writing to the sub district. (3) In the establishment of a consultation center, DKUPP Bintan Regency has and Integrated Business Service Center (PLUT) but can't run optimally because human resources are still inadequate and the PLUT building is still far from the reach of micro entrepreneurs in Bintan Regency. (4) In creating a join marketing system, DKUPP Bintan Regency has carried out several methods, including by holding bazaars, promoting micro business products via Whatsapp and implementing a new policy plans related to e-catalogue and reinforcement. (5) On the indicators of creating research and development institutions, Bintan Regency does not yet have a research center specifically designated for business actors in Bintan Regency. The conclusion of the research is that the strategy implemented by DKUPP Bintan Regency has not run optimally because there are still several obstacles in the development process.*

Keywords: *Strategy, Micro Enterprises, Maritime Affairs and Fisheries.*

Abstrak. Kabupaten Bintan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah dikarenakan sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Usaha mikro dengan jenis kelautan perikanan berada di urutan ketiga setelah kuliner dan *retail* di Kabupaten ini. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan di dalam mengembangkan usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan yaitu masih kurangnya penerapan *digital marketing* bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi DKUPP dalam mengembangkan usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) Pada indikator penciptaan iklim usaha yang baik, DKUPP Kabupaten Bintan telah melaksanakan beberapa praktik atau program dalam rangka mengembangkan usaha mikro khususnya yang berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten

Bintan. (2) Pada pembuatan informasi terpadu, DKUPP Kabupaten Bintan menyebarkan seluruh informasi kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan melalui *Whatsapp* Grup, media sosial instagram, siaran radio serta menyurati Kecamatan. (3) Pada pendirian pusat konsultasi, DKUPP Kabupaten Bintan memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) namun belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan SDM yang masih belum memadai dan gedung PLUT yang masih jauh dari jangkauan para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan. (4) Pada pembuatan sistem pemasaran bersama, DKUPP Kabupaten Bintan telah melaksanakan beberapa cara antara lain dengan mengadakan bazar, mempromosikan produk usaha mikro melalui whatsapp, serta melaksanakan rencana kebijakan baru yang terkait dengan *e-katalog* dan bala pengadaan. (5) Pada indikator pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan, Kabupaten Bintan belum memiliki pusat penelitian yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha di Kabupaten Bintan. Kesimpulan penelitian adalah strategi yang dijalankan oleh DKUPP Kabupaten Bintan belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala di dalam proses pengembangannya.

Kata Kunci: Strategi, Usaha Mikro, Kelautan dan Perikanan

PENDAHULUAN

Perkembangan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan agar dapat mengembangkan suatu usaha menjadi lebih baik dan mencapai suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM (Annisa Fitri, 2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu bagian terpenting bagi perekonomian suatu negara. UMKM berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Samtono dalam Fajar Febrian, 2019). UMKM juga dinilai sangat tangguh sehingga dapat bertahan terhadap krisis ekonomi dan moneter (Hamzah dalam Dwi Mirani, 2022).

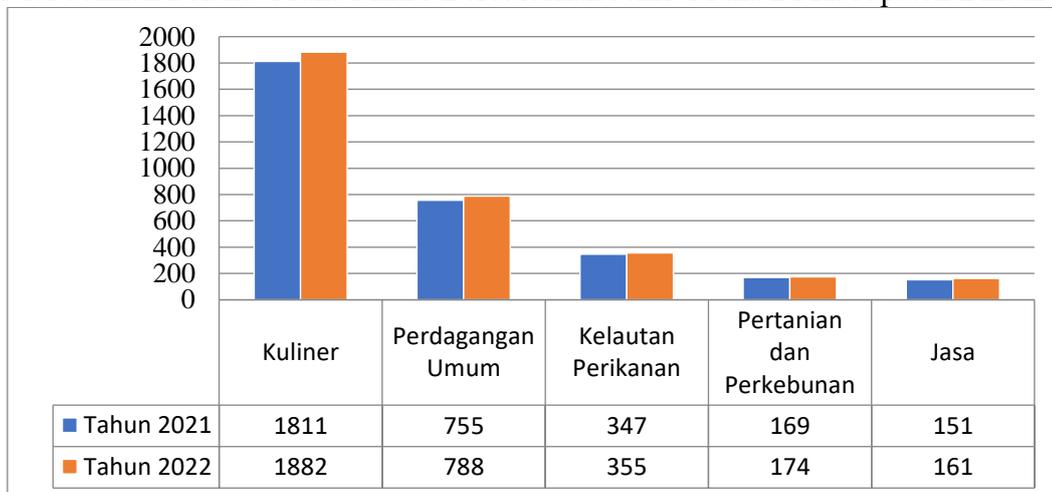
Berdasarkan rilis data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 116 juta orang. Namun didalam perjalanannya, para pelaku bisnis UMKM juga tidak terlepas dari kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi didalam menjalankan usahanya. Pelaku UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan seperti bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan (*Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024*).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah merancang strategi khususnya dalam bidang usaha mikro dalam rangka memajukan dan mengembangkan dunia usaha mikro di Kabupaten Bintan. Namun, masih sedikit studi yang menjelaskan strategi Dinas dalam mengembangkan usaha mikro yang berbasis potensi kelautan

dan perikanan. UMKM berbasis potensi lokal saat ini sangat digaungkan oleh pemerintah daerah. Sebagai pilar perekonomian rakyat Indonesia, UMKM hendaknya harus tetap eksis dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan modernisasi. Potensi lokal yang dinyatakan tersebut merupakan suatu potensi yang dimiliki dan disesuaikan oleh masing-masing daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Usaha Mikro berbasis potensi lokal yang berada di Kabupaten Bintan.

Usaha Mikro berbasis potensi lokal berupa kelautan dan perikanan merupakan keunggulan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya UMKM dengan Sentra Usaha Kerupuk Ikan terbesar yang telah berkembang dan berada di Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Selain adanya Sentra Usaha Kerupuk Ikan di Sei Lekop, Kabupaten Bintan juga memiliki Kampung Kuliner Otak-Otak yang berada di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dimana kampung ini memiliki total jumlah pelaku usaha mikro yang berbasis potensi kelautan dan perikanan sebesar lima belas pelaku usaha mikro dengan produk usahanya yaitu Otak-Otak. Adapun peta persebaran jumlah pelaku usaha berdasarkan jenis usaha di Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan Jenis Usaha Di Kabupaten Bintan



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, (telah diolah kembali)

Berdasarkan pengelompokan usaha mikro menurut jenisnya, secara keseluruhan terdapat lima belas jenis usaha mikro dengan total jumlah pelaku usaha pada tahun 2021 sebesar 3648, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 3887 pelaku usaha di Kabupaten Bintan. Lima jenis usaha mikro teratas dipegang oleh Kuliner, Perdagangan Umum, Kelautan Perikanan, Pertanian dan Perkebunan serta Jasa.

Jenis usaha mikro pertama dipegang oleh usaha mikro jenis kuliner dengan jumlah sebesar 1811 pada tahun 2021 lalu bertambah menjadi 1822 pada tahun 2022. Disusul oleh perdagangan umum (*retail*) dengan jumlah usaha mikro sebesar 755 pada tahun 2021 lalu bertambah menjadi 788 pada tahun 2022. Urutan ketiga adalah usaha mikro jenis kelautan dan perikanan dengan jumlah usaha mikro sebesar 347 pada tahun 2021 lalu bertambah 355 pada tahun 2022 dan seterusnya.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mengembangkan usaha mikro yang berada di Kabupaten Bintan, salah satunya berupa pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro terkait. Rincian pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Rincian Bantuan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bintan

No	Kategori Bantuan Usaha	Keterangan
1	Sarana Prasarana Penunjang Usaha	Pemberian bantuan alat-alat masak seperti kompor, kuuli, spatula dan sebagainya
2	KMB (Kredit Mikro Bangkit)	Pemberian bantuan peminjaman modal kepada pelaku usaha berupa subsidi bunga sebesar 0% dengan batas peminjaman 20 Juta Rupiah bagi pelaku usaha mikro

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (telah diolah kembali)

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyebutkan hingga tahun 2018 Indonesia memiliki 64,1 Juta pelaku usaha industri usaha mikro, kecil, dan menengah dan terus bertambah hingga kini. Namun dari jumlah tersebut, baru 20% atau 12,82 Juta yang sudah meleak digital.

Kurangnya penerapan digital marketing bagi pelaku usaha mikro khususnya yang berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan juga menjadi salah satu permasalahan yang masih belum dapat terselesaikan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Pendamping Koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.

Gambar 1.2 Persentase Penerapan Digital Marketing



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, 2023

Dari data diatas dapat kita lihat dari total jumlah pelaku usaha mikro yang berbasis potensi kelautan dan perikanan yaitu sebesar 355 pelaku usaha, hanya sekitar 25% atau hanya sekitar 89 pelaku usaha mikro yang sudah menerapkan *digital marketing*, sedangkan sisanya 75% belum menerapkan alias masih menjalankan usaha mikro secara konvensional. Hal ini dikarenakan pelaku usaha mikro tersebut masih banyak didominasi oleh ibu-ibu yang bisa dibilang belum terlalu paham dengan teknologi ataupun bagaimana teknik *digital marketing*.

Pengembangan Usaha Mikro tidak terlepas dari peran dan andil pemerintah sebagai fasilitator. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha dengan melihat permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha mikro memiliki masalah yang berbeda-beda dan harus dipetakan dengan secara seksama agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kedepannya dapat menyelesaikan permasalahan. Diperlukan adanya komunikasi yang efektif antara si pelaku usaha yaitu usaha mikro dengan pemerintah setempat yang dalam hal ini merupakan Kabupaten Bintan.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bintan dikarenakan Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten di Kepulauan Riau yang memiliki potensi sangat besar dalam bidang kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya UMKM dengan Sentra Usaha Kerupuk Ikan Terbesar yang berada di Kelurahan Sei Lekop serta Pusat Kuliner Otak-Otak Terbesar di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Adapun salah satu alasan peneliti mengambil penelitian dengan judul “Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Berbasis Potensi Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Bintan” dikarenakan penelitian terdahulu atau *Research Gap* yang peneliti temukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau sering disebut juga dengan *research gap*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Tri, dkk (2023) dapat dilihat bahwasanya masih diperlukan pendekatan yang tepat sehingga dapat membantu UMKM dalam mengembangkan dan memasarkan produknya untuk distribusi online. Penelitian ini juga mengungkapkan ada beberapa langkah strategi yang harus dilakukan oleh UMKM di Desa terkait agar dapat mengembangkan usahanya, strategi tersebut adalah persiapan, kehadiran, portal, integrasi transaksi, dan otonomi.

Sedangkan penelitian menurut Mohammad Nur, dkk (2021) yang menyatakan terdapat tiga opsi strategi yang dikaji antara lain pemasaran digital yang responsif, pengelolaan hubungan pelanggan, dan efisiensi modal kerja. Serta penelitian yang dilakukan oleh Mastur Mujib, dkk (2021) mengemukakan bahwasanya UMKM telah menjadi *backbone* dan *buffer zone* yang telah menyelamatkan negara dari kemerosotan ekonomi. Namun selama pandemi Covid-19 banyak UMKM yang tidak berdaya dan jatuh satu persatu dengan cepat. Peneliti beranggapan bahwa diperlukannya strategi peningkatan daya saing UMKM agar dapat bertahan.

Dari beberapa gejala tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Berbasis Potensi Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Bintan.**”

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, Strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Berbasis Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bintan. Dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Berbasis Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bintan serta dapat menghasilkan saran atau rekomendasi perbaikan strategi dalam mengembangkan usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif, dengan objek penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan usaha mikro yang berbasis potensi kelautan dan perikanan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini dilakukan secara, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melaksanakan analisis data secara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Berbasis Potensi Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Bintan” dengan rujukan teori Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*Business Development Strategy*) oleh Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah” tahun 2009 yang meliputi lima indikator yaitu Penciptaan Iklim Usaha yang Baik Bagi Dunia Usaha, Pembuatan Informasi Terpadu, Pendirian Pusat Konsultasi dan Pengembangan Usaha Kecil, Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama untuk Menghindari Skala yang Tidak Ekonomis serta Pembuatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Pelaku Usaha.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, secara singkat peneliti dapat melihat bahwasanya potensi sangat besar dimiliki oleh usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua Sentra Industri yang berada di Kabupaten Bintan yaitu Sentra Kerupuk Ikan di Kelurahan Sei Lekop dan Pusat Kuliner Otak-Otak di Kelurahan Sungai Enam. Dua sentra terbesar di Kabupaten Bintan didominasi oleh para pelaku usaha mikro yang berbasis potensi kelautan dan perikanan.

Namun nyatanya memang masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam proses mengembangkan usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan tersebut. Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan masih sedikit sekali yang menerapkan *digital marketing*. Berikut merupakan penjabaran peneliti dengan menggunakan

model strategi pengembangan dunia usaha menurut Lincoln Arsyad tahun 2009 (Arsyad, 2009).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan serta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Kebijakan dan strategi yang diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal yang berdaya saing, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas terkait khususnya dalam bidang Usaha Mikro dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu masih kurangnya penerapan digital marketing bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha mikro tersebut masih banyak didominasi oleh ibu-ibu yang dapat dikatakan belum terlalu memahami teknologi ataupun bagaimana seharusnya *digital marketing* dilakukan.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa strategi yang dibuat dan ditetapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan cerminan dalam mendukung tercapainya visi dan misi sebuah daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka waktu menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita-cita dan harapan bersama dengan tekad melakukan sejumlah perubahan-perubahan mendasar untuk mempersiapkan pondasi yang lebih kuat bagi pembangunan Kabupaten Bintan pada periode 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah “Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera.” Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan berperan serta dalam pencapaian Misi ke-1 Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bintan yaitu: “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal yang Berdaya Saing”.

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dengan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan dan telah disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teori Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*Business Development Strategy*) menurut Lincoln Arsyad (2009: 123) dimana teori ini dapat menggambarkan bagaimana konsep yang ideal mengenai cara membangun dunia usaha dimulai dari penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembuatan informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran bersama hingga pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan bagi pelaku usaha.

Selama penelitian berlangsung, peneliti dapat melihat bahwasanya kondisi usaha mikro di Kabupaten Bintan memiliki potensi lokal yang sangat luas yaitu kelautan dan perikanan, hal ini dapat dilihat dari data persebaran pelaku usaha mikro yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Bintan serta data pelaku usaha mikro berdasarkan jenis usaha di Kabupaten Bintan.

Dalam hal pengembangan usaha mikro yang berbasis potensi kelautan dan perikanan dapat dikatakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yaitu masih kurangnya penerapan digital marketing bagi pelaku usaha mikro, masih terbatasnya jangkauan pemasaran produk usaha mikro, rendahnya akses pembiayaan usaha mikro, serta rendahnya kualitas kemasan usaha mikro. Namun dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Secara rinci, mengacu pada teori Pembangunan Dunia Usaha (*Development Business Strategy*) menurut Lincoln Arsyad (2009: 123) bahwa dalam mengembangkan dunia usaha maka ada 5 (lima) hal yang harus dilakukan yaitu penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembuatan informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran bersama, serta pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan bagi pelaku usaha. Kelima indikator tersebut dianalisa kembali menggunakan beberapa konsep dari beberapa ahli.

A. STRATEGI IKLIM USAHA

Iklim usaha adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Kebijakan dan perilaku pemerintah memiliki suatu pengaruh yang besar melalui dampaknya terhadap biaya, risiko, dan pembatasan bagi persaingan (World Bank, 2005: 32). Iklim usaha yang kondusif akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan-kesempatan dan

insentif bagi badan-badan usaha untuk berkembang, menyesuaikan diri dan menerapkan cara-cara yang lebih baik dalam menjalankan investasi.

Suatu kondisi iklim usaha yang ideal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan dari usaha-usaha mikro ke multinasional atau perusahaan swasta untuk berkembang dan melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan berkembang. Oleh karenanya, iklim usaha yang baik memainkan suatu peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Hidayat, 2020).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah menciptakan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan beberapa cara antara lain yaitu dengan menghadirkan program Subsidi Bunga 0%, menjalin kerjasama pemasaran dengan pihak Alfamart, mengadakan program Kurasi Bank Indonesia, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, membantu mengurus perizinan pelaku usaha mikro serta mengadakan pelatihan dan memfasilitasi sarana prasarana usaha mikro terkait.

a) Program Subsidi Bunga 0%

Subsidi Bunga 0% merupakan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimana program ini memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa perlu memikirkan pinjaman bunga karena pinjaman bunga akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Program ini dilimpahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dimulai dari tahun 2022 hingga sekarang 2023. Subsidi Bunga 0% merupakan sebuah upaya penguatan dan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu wujud pembangunan daerah agar usaha mikro dapat berkembang sebagaimana mestinya.

b) Kerjasama Alfamart

Selain program Subsidi Bunga 0%, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga menjalin kerjasama pemasaran atau MOU dengan pihak Alfamart. Jaringan kerjasama yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan Perdagangan dengan Alfamart merupakan salah satu bentuk penciptaan iklim usaha yang baik dalam bidang pemasaran. Kurasi Alfamart merupakan sebuah program pemasaran dimana para pelaku usaha mikro yang memiliki persyaratan dan perizinan lengkap akan di Kurasi produknya oleh Alfamart, apabila seluruh indikator telah terpenuhi maka produk dari pelaku usaha mikro tersebut dapat dipasarkan di Alfamart.

c) Program Kurasi Bank Indonesia

Selanjutnya masih berkaitan dengan penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga melaksanakan program turunan dari Bank Indonesia yaitu program Kurasi Bank Indonesia. Beberapa pencapaian dari pelaku usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan dalam Program Kurasi Bank Indonesia. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas mengenai penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dalam hal Program Kurasi Bank Indonesia bagi pelaku usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan dapat kita lihat bahwasanya Program Kurasi Bank Indonesia merupakan program dari Bank Indonesia dan diturunkan serta dilimpahkan ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan tujuan untuk mencari produk-produk unggulan yang akan diikutkan dalam Kurasi.

d) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Jalanan kerjasama dalam hal pengembangan UMKM juga dijalankan oleh Dinas Terkait dengan perguruan tinggi yang berada di Kota Tanjungpinang yaitu STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan). STIE Pembangunan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam upaya untuk pembelajaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memiliki tujuan untuk menyinkronkan program-program prioritas di Kabupaten Bintan seperti Program Subsidi Bunga 0% bagi pelaku UMKM, Program Gerbang Kampung, serta Desa Wisata. Adapun STIE Pembangunan bermitra dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dalam program kerjasama pengembangan UMKM.

e) Pengurusan Perizinan Usaha

Selanjutnya masih berbicara mengenai Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga berupaya menciptakan iklim dunia usaha yang baik dengan cara membantu mengurus atau memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal gratis, pengurusan izin edar, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta kepengurusan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Berdasarkan beberapa penjabaran diatas dapat kita lihat bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan berupaya menciptakan iklim usaha yang baik dengan membantu mengurus perizinan seperti sertifikasi halal, izin edar, Nomor Induk Berusaha (NIB) serta PIRT.

f) Pelatihan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga melaksanakan pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan bagi seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas mengenai penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dalam hal pelatihan bagi pelaku usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan dapat kita lihat bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan mengadakan dua kali pelatihan dalam setahun. Tahun 2023 ini akan dilaksanakan pelatihan dengan tema Kewirausahaan dan Literasi Keuangan.

g) Pendampingan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga melaksanakan pendampingan sebagai bentuk pembinaan dari Dinas terkait dengan pelaku usaha mikro khususnya berbasis potensi kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bintan. Berdasarkan penjabaran diatas mengenai penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dalam hal pembinaan bagi seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan dapat dikatakan bahwasanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dilakukan dalam bentuk pendampingan pelaku usaha.

h) Fasilitas Sarana Prasarana Usaha Mikro

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana usaha mikro khususnya pelaku usaha mikro yang berbasis potensi kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bintan. Pendamping Koperasi dan UMKM Kabupaten Bintan. Berdasarkan penjabaran diatas mengenai penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dalam hal fasilitasi sarana prasarana bagi seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan didapati bahwasanya bantuan sarana prasarana didapatkan dari dana hibah atau POKIR (Pokok Pikiran) dari Dewan tetapi dianggarkan dan dibebankannya kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Adapun sarana prasarana yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan terkait berupa alat-alat produksi, alat bengkel, alat kuliner, etalase, dan sebagainya.

Suatu kondisi iklim usaha yang ideal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan dari usaha-usaha mikro ke multinasional atau perusahaan swasta untuk berkembang dan melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan berkembang. Oleh karenanya, iklim usaha yang baik memainkan suatu peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Lestari dan Hidayat, 2014).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah menciptakan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan beberapa cara antara lain yaitu dengan menghadirkan program Subsidi Bunga 0%, menjalin kerjasama pemasaran dengan pihak Alfamart, mengadakan program Kurasi Bank Indonesia, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, membantu mengurus perizinan pelaku usaha mikro serta mengadakan pelatihan dan memfasilitasi sarana prasarana usaha mikro terkait.

Berdasarkan teori Strategi Pengembangan Dunia Usaha menurut Lincolin Arsyad (2009: 123), penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dapat dilakukan melalui peraturan dan praktik yang dapat memberikan kenyamanan bagi dunia usaha dengan tetap menghindari pencemaran lingkungan. Hal ini memiliki arti bahwa dalam proses menciptakan iklim usaha yang ideal bagi dunia usaha khususnya usaha mikro maka dibutuhkan sebuah pengaturan dan kebijakan yang dapat mempermudah dunia usaha dan pada saat yang sama juga dapat mencegah penurunan kualitas lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Berdasarkan teori tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, peneliti mendapati bahwa penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha telah dilakukan dengan beberapa cara yakni seperti dijalankannya program-program oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada serta mengembangkan kembali dunia usaha mikro khususnya yang berpotensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bintan. Adapun beberapa program atau praktik yang dijalankan oleh Dinas terkait dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4 Program Kerja Bidang Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Bintan

No	Program	Tujuan	Waktu
1	Program Kredit Mikro Bangkit dengan subsidi bunga 0% bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan	Mengatasi permasalahan dalam hal akses pembiayaan atau permodalan pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan	Berkelanjutan

No	Program	Tujuan	Waktu
2	Bekerjasama dengan pihak swalayan Alfamart untuk memasukkan produk-produk usaha mikro di setiap cabangnya	Mendorong para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan untuk dapat menciptakan produk yang unggul dan berkualitas agar mampu bersaing dengan produk luar daerah	Berkelanjutan
3	Program Kurasi Bank Indonesia turunan dari pusat ke daerah bagi seluruh pelaku usaha mikro yang berada di Kabupaten Bintan	Mendorong para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan untuk dapat menciptakan dan mengelola produk unggul agar dapat dikembangkan dan dilestarikan di kemudian hari	Berkelanjutan
4	Pelatihan Kewirausahaan, Literasi Keuangan serta <i>Packaging</i> (Kemasan)	Mengupayakan peran DKUPP Bintan dalam membina pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan	Berkelanjutan (Setahun Dua Kali)
5	Outlet UMKM Lantai Satu Kantor DKUPP Kabupaten Bintan	Membantu mempromosikan produk-produk UMKM Kabupaten Bintan	Berkelanjutan
6	Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) turunan dari pusat ke daerah bagi seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan	Memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan	Berkelanjutan
7	Memfasilitasi pengurusan Perizinan usaha mikro berupa Izin Edar, Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	Membantu pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan khususnya dalam hal pengurusan perizinan usaha	Berkelanjutan
8	Event Bazar Produk Usaha Mikro Kabupaten Bintan	Memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk usaha mikro di Kabupaten Bintan kepada masyarakat luas	Tentatif

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bintan, 2023 (Telah Diolah Kembali)

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bersama bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menciptakan iklim usaha yang baik dengan cara memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, pendampingan, serta turut serta memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan. Selain itu juga Dinas telah menjalankan program-program dalam rangka menciptakan iklim usaha yang baik bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan seperti pada akses pembiayaan

terdapat program Subsidi Bunga 0%, pada aspek pemasaran terdapat jalinan kerjasama pihak Alfamart, kemudian juga ada program turunan dari Bank Indonesia yaitu Kurasi Produk UMKM di Kabupaten Bintan.

Dalam menciptakan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dalam hal pemasaran bagi pelaku usaha mikro, telah dilakukan jalinan kerjasama antara Bidang Usaha Mikro Kabupaten Bintan dengan Alfamart. Pihak Alfamart dan pelaku usaha akan dipertemukan lalu Alfamart lah yang akan menilai atau melakukan Kurasi secara langsung apakah produk dari pelaku usaha tersebut dapat di *display* di Alfamart atau tidak. Adapun indikator yang dilihat oleh pihak Alfamart yaitu dimulai dari segi perizinan usaha seperti izin edar dan sertifikasi halal.

Selanjutnya masih berkaitan dengan penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan melaksanakan program turunan dari Bank Indonesia yaitu Program Kurasi Bank Indonesia. Program Kurasi Bank Indonesia merupakan program dari Bank Indonesia dan diturunkan serta dilimpahkan ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dengan tujuan untuk mencari produk-produk unggulan yang akan diikuti dalam Kurasi.

Program ini memiliki tiga tahap seleksi pelaku usaha mikro yaitu dimulai dari seleksi Kabupaten Kota lalu dilanjutkan seleksi Provinsi lalu tingkat Nasional. Beberapa prestasi atau pencapaian terbaik saat ini jika dilihat dari segi pemasaran dan Kurasi dimiliki oleh Ibu Surtiati selaku pelaku usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan dengan produk usahanya yaitu Manggar Abadi Kriya Sisik Ikan dengan produknya yang sudah berhasil tampil di event besar *Paris Fashion Week*. Selain itu juga terdapat produk usaha mikro berbasis potensi kelautan perikanan yaitu Tongkol Salai yang sudah berhasil memasarkan produknya hingga ke Maldives melalui Kurasi.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga melaksanakan pendampingan sebagai bentuk pembinaan dari Dinas kepada pelaku usaha mikro khususnya yang berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan. Adapun pembinaan yang dilakukan berbentuk pendampingan pelaku usaha. Selain pendampingan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan.

Bantuan berupa sarana prasarana bagi pelaku usaha mikro Kabupaten Bintan didapatkan dari dana hibah atau POKIR (Pokok Pikiran) dari Dewan tetapi dianggarkan dan dibebankannya kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bintan. Adapun sarana prasarana yang diberikan oleh Dinas terkait berupa alat-alat produksi, alat bengkel, alat kuliner, serta etalase.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan berupaya menciptakan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan cara membantu mengurus atau memfasilitasi pengurusan setifikasi halal gratis, pengurusan izin edar, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mengurus PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Dinas juga mengadakan pelatihan dengan eksistensi waktu berupa dua kali dalam satu tahun, pada tahun 2023 ini telah direncanakan untuk mengadakan pelatihan dengan tema Kewirausahaan dan Literasi Keuangan.

Kemudian masih berada di dalam indikator yang sama yaitu penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga mengadakan event Bazar Produk usaha mikro dalam rangka memperkenalkan produk-produk usaha mikro yang berada di Kabupaten Bintan.

B. STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

Menurut Ward dan Peppard (2002), strategi teknologi informasi adalah strategi yang berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah informasi. Strategi informasi juga dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi siapa sejatinya pemilik informasi yang bertanggung jawab penuh atas informasi tersebut serta bagaimana peta keterikatan antara keduanya.

Menurut Ward dan Papperd (2002), terdapat empat jenis utama dalam pemanfaatan strategi dari sistem dan teknologi informasi. Klasifikasi ini dapat membantu untuk mempertimbangkan keterlibatan dari strategi. Klasifikasi tersebut antara lain:

1. Strategi tersebut digunakan untuk berbagi informasi antara perusahaan dengan pelanggan dan atau dengan pemasok.
2. Hal tersebut meningkatkan keefektifan dalam integrasi untuk penciptaan penambahan nilai perusahaan.
3. Memudahkan perusahaan untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan dan melayani pelanggan.
4. Mendukung *executive management* untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi.

Lincoln Arsyad juga menjelaskan bahwasanya pemerintah dalam proses mengembangkan usaha mikro dibutuhkan pembuatan informasi terpadu dalam rangka menghasilkan informasi yang telah terintegrasi menjadi satu kesatuan agar dapat memudahkan

pelaku usaha untuk menghubungi pejabat pemerintah daerah mengenai kepentingan apapun terutama informasi mengenai perizinan, rencana pengembangan ekonomi daerah, pemerintah daerah, ketersediaan lahan, izin memberikan bangunan, dan lain-lain.

Berdasarkan seluruh penjabaran diatas mengenai indikator Pembuatan Informasi Terpadu, dapat penulis simpulkan bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menyebarkan seluruh informasi kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan melalui Whatsapp Grup, media sosial instagram PLUT Bintan, siaran radio serta surat ke Kecamatan.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI

Di dalam Jurnal yang ditulis oleh Ernita Lestari dan Paidi Hidayat dijelaskan bahwasanya peran ekonomi daerah adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pemerintah Daerah memiliki empat peran strategi dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni:

1. Peran sebagai enterpreneur, pemda bertanggung jawab menjalankan bisnis (BUMD)
2. Peran koordinator, penetapan dalam kebijakan dan strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat
3. Peran fasilitator, pemerintah daerah mempercepat pembangunan daerah melalui perbaikan lingkungan (perilaku)
4. Peran stimulator, memberikan rangsangan pengembangan usaha dan investasi.

Berdasarkan fungsi dan peranan diatas dalam pembangunan ekonominya, berikut beberapa strategi dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan fisik atau lokalitas, kawasan industri, kawasan investasi lainnya
2. Strategi pengembangan dunia usaha melalui upaya-upaya kebijakan yang merangsang usaha melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan
 - b. Pengembangan pusat informasi dan promosi
 - c. Pusat pengembangan usaha kecil
 - d. Pusat penelitian produk daerah

Menurut Lincoln Arsyad, dunia usaha di dalam pembangunan suatu negara memiliki peran yang sangat penting. Selain peran penting mereka sebagai pencipta lapangan kerja serta penggerak kewirausahaan, usaha kecil sering kali mengalami kegagalan perkembangan. Alasan utamanya adalah manajemen usaha kecil yang masih buruk. oleh karena itu, dibutuhkan

pembuatan pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil yang siap membantu untuk meningkatkan operasinya.

D. STRATEGI PEMASARAN

Menurut Kotler (2002) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain agar mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk, jasa dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Menurut Kotler dan Armstrong (2008), pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran dimana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Strategi pemasaran memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada tiga faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu:

- a. Produksi
- b. Pemasaran
- c. Konsumsi

Menurut Lincolin Arsyad, dalam proses pengembangan usaha mikro dibutuhkan pembuatan sistem pemasaran bersama atau penciptaan sistem pasar dalam rangka menghindari skala produksi yang tidak ekonomis, dapat meningkatkan daya saing jika dibandingkan dengan produk impor serta dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha.

Berdasarkan seluruh penjabaran diatas mengenai indikator Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama, dapat penulis simpulkan bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah memfasilitasi sistem pemasaran bersama yang dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan mengadakan bazar serta bersinergi dengan OPD-OPD terkait di Kabupaten Bintan, memfasilitasi kerjasama pemasaran dengan pihak Alfamart, mempromosikan produk-produk usaha mikro di Bintan melalui whatsapp, serta melaksanakan rencana kebijakan baru yang terkait dengan e-katalog dan bala pengadaan dengan tujuan untuk meminimalisir pembelian barang impor di Kabupaten Bintan.

E. SISTEM INFRASTRUKTUR

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Dalam World Bank Report, infrastruktur dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

- a. Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final.
- b. Infrastruktur Sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, serta rekreasi.
- c. Infrastruktur Administrasi/Institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan (Bank Dunia 1994 dalam Bagus Teguh Pamungkas, 2009).

Lincoln Arsyad juga menyatakan dalam proses pengembangan dunia usaha dibutuhkan pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Persaingan yang berkembang di dunia berbasis pengetahuan saat ini sangat membutuhkan penelitian berkelanjutan oleh para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mengembangkan produk baru, mengembangkan teknologi baru dan mencari pasar yang baru.

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai indikator Pembuatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Usaha Mikro, dapat penulis simpulkan bahwasanya Kabupaten Bintan belum memiliki Lembaga Penelitian dan Pengembangan ataupun pusat penelitian yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha di Kabupaten Bintan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik analisis data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan judul penelitian Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Berbasis Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bintan, dapat dilihat bahwasanya penelitian ini memiliki kontribusi dalam basis potensi kelautan dan perikanan melalui pengembangan usaha mikro yang berada di Kabupaten Bintan.

Penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain telah banyak ditemukan topik mengenai Strategi Dinas Dalam Pengembangan Usaha Mikro, namun masih sedikit penelitian yang membahas mengenai

Pengembangan Usaha Mikro menggunakan Basis Potensi. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep mengenai Strategi Dinas dalam mengembangkan usaha mikro khususnya yang berbasis potensi kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dalam mengembangkan usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan berdasarkan indikator teori Strategi Pengembangan Dunia Usaha (*Business Development Strategy*) menurut Lincoln Arsyad (Dalam Bukunya yang Berjudul Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua, 2009: 123) maka:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Baik Bagi Dunia Usaha

Dapat disimpulkan secara keseluruhan mengenai Penciptaan Iklim Usaha yang Baik Bagi Dunia Usaha bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah merencanakan dan melaksanakan beberapa praktik atau program-program dalam rangka mengembangkan usaha mikro khususnya yang berbasis potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan.

Program-program tersebut antara lain pada bidang pemasaran terdapat event Bazar yang dilaksanakan menyesuaikan dengan agenda daerah Kabupaten Bintan. Selanjutnya pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga berinisiatif untuk membuka Outlet UMKM yang berada di lantai satu kantor DKUPP Bintan dimana para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan dapat menitipkan produknya kepada pihak DKUPP. Tidak lupa pula pihak Dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah menjalin kerjasama dengan Alfamart untuk melakukan Kurasi produk pada pelaku usaha mikro di Bintan agar dapat memasarkan produknya dan dapat di display dalam Alfamart.

Dalam hal akses pembiayaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan memiliki Program Kredit Mikro Bangkit dengan Subsidi Bunga sebesar 0% bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga menjalankan Program Kurasi Bank Indonesia. Program ini merupakan program turunan dari pusat ke daerah bagi seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah mengupayakan perannya dalam membina pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan dengan

cara mengadakan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, serta pelatihan *packaging* atau kemasan.

Terakhir, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah berusaha dengan membantu dan memfasilitasi pengurusan perizinan usaha mikro berupa Izin Edar, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal serta Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

2. Pembuatan Informasi Terpadu

Dalam indikator Pembuatan Informasi Terpadu, dapat penulis simpulkan bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menyebarkan seluruh informasi kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan melalui Whatsapp Grup, media sosial instagram PLUT Bintan, siaran radio serta menyurati Kecamatan.

3. Pendirian Pusat Konsultasi dan Pengembangan Usaha Kecil

Mengenai indikator Pendirian Pusat Konsultasi dan Pengembangan Usaha Kecil, dapat penulis simpulkan bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Bintan namun belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan SDM yang masih belum memadai dan gedung PLUT yang masih jauh dari jangkauan para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan.

Konsultasi yang dilakukan biasanya hanya melalui perantara whatsapp ataupun pendampingan pelaku usaha secara langsung tatap muka. Adapun masalah pokok yang sering dikonsultasikan oleh pelaku usaha mikro di Bintan adalah masalah kemasan. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bintan sendiri belum memiliki Rumah Kemasan tersendiri dan masih bergantung dengan Rumah Kemasan milik Disperindag Provinsi Kepulauan Riau.

4. Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama

Berdasarkan seluruh penjabaran diatas mengenai indikator Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama, dapat penulis simpulkan bahwasanya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah memfasilitasi sistem pemasaran bersama yang dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan mengadakan bazar serta bersinergi dengan OPD-OPD terkait di Kabupaten Bintan, memfasilitasi kerjasama pemasaran dengan pihak Alfamart, mempromosikan produk-produk usaha mikro di Bintan melalui *whatsapp*, serta melaksanakan rencana kebijakan baru yang terkait dengan e-

katalog dan bala pengadaan dengan tujuan untuk meminimalisir pembelian barang impor di Kabupaten Bintan.

5. Pembuatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Pelaku Usaha

Pada indikator Pembuatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Usaha Mikro, dapat penulis simpulkan bahwasanya Kabupaten Bintan belum memiliki Lembaga Penelitian dan Pengembangan ataupun pusat penelitian yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha di Kabupaten Bintan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, secara umum Strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan sudah cukup baik, akan tetapi sebaiknya perlu untuk dilakukan beberapa perbaikan strategi agar pengembangan usaha mikro berbasis potensi kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal. Adapun saran ataupun sumbangsih pemikiran dari peneliti kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan antara lain:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Baik Bagi Dunia Usaha

Pada proses Penciptaan Iklim Usaha yang Baik Bagi Dunia Usaha, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah berupaya menciptakan praktik-praktik atau program dalam rangka pengembangan usaha mikro khususnya yang berbasis potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan. Meskipun demikian, peneliti melihat masih ada beberapa poin yang belum dapat berjalan secara maksimal dan masih perlu diperhatikan kembali. Poin-poin tersebut antara lain masih sedikit pelaku usaha mikro di Bintan yang lolos Kurasi Alfamart dikarenakan terhalangnya administrasi perizinan serta pelatihan yang diberikan DKUPP Bintan kepada pelaku usaha mikro sangatlah sedikit yaitu hanya dua kali dalam setahun.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan hendaknya meningkatkan kembali kualitas produk usaha mikro di Kabupaten Bintan dengan cara memperbaiki kembali agenda pelatihan bagi pelaku usaha mikro di Bintan. Pelatihan yang biasanya diagendakan setahun hanya dua kali dinilai sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan total populasi pelaku usaha mikro yang mencapai tiga ribuan lebih, ditambah lagi dengan kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau menuntut Pemerintah untuk lebih ekstra memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan.

Dinas terkait hendaknya juga memfilter secara serius pelaku usaha mikro mana saja yang bisa diberikan pelatihan agar ilmu yang telah didapatkan bisa direalisasikan dalam kehidupan dunia usaha nantinya. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau, peneliti menyarankan agar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan melakukan strategi perpanjangan tangan dengan model pelatihan yang berkonsep “*Training For Trainer*”.

“*Training For Trainer*” ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang memiliki kapasitas menjadi pembicara agar ilmu yang sudah didapatkan dapat disalurkan kembali ke tingkat yang lebih rendah seperti Kelurahan. Adapun peserta pelatihan ini hendaknya diisi oleh perwakilan masing-masing Kecamatan yang berada di Kabupaten Bintan. Pelaku usaha mikro terpilih dan sudah berhasil mendapatkan ilmu tersebut hendaknya dijadikan mentor di setiap wilayah agar pengembangan usaha mikro dapat tersebar secara luas dan merata.

2. Pembuatan Informasi Terpadu

Pada indikator Pembuatan Informasi Terpadu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan masih belum memiliki *website* resmi ataupun sosial media resmi yang dipegang dan dikelola oleh pihak Dinas terkait. Alangkah lebih baiknya apabila Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan memiliki Sistem Informasi Terpadu berupa *website* resmi dan media sosial seperti *instagram* dan *facebook* agar pemberitahuan informasi menjadi satu kesatuan yang utuh serta dapat memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara luas.

3. Pendirian Pusat Konsultasi dan Pengembangan Usaha Kecil

Pada indikator Pendirian Pusat Konsultasi dan Pengembangan Usaha Kecil, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Bintan namun belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan SDM yang masih belum memadai dan gedung PLUT yang masih jauh dari jangkauan para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan. Peneliti menyarankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan untuk menjalankan strategi “Jemput Bola.”

Strategi Jemput Bola adalah sebuah strategi dimana pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan bersama pengelola PLUT untuk

mengunjungi secara langsung pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan ataupun berkonsultasi secara rutin mengenai pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bintan.

Peneliti juga menyarankan kepada DKUPP Kabupaten Bintan untuk menyediakan Layanan Konsultasi Keliling (LKK) bagi seluruh pelaku usaha mikro yang berada di Kabupaten Bintan. Layanan Konsultasi Keliling dapat menggunakan media transportasi berupa mobil dan diharapkan dapat menjangkau pelaku usaha mikro yang masih berada di wilayah terpencil dan jauh seperti Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Tambelan. Ketika pendampingan belum bisa menjamah seluruh wilayah di Bintan serta mengingat hampir sebagian besar pelaku usaha mikro di Bintan masih belum terbiasa dengan teknologi, Mobil Layanan Konsultasi Keliling bagi seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Bintan dapat menjadi bahan alternatif pengembangan usaha mikro kedepannya.

Terdapat masalah pokok yang sering dikonsultasikan oleh pelaku usaha mikro di Bintan yaitu masalah kemasan. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bintan sendiri belum memiliki Rumah Kemasan tersendiri dan masih bergantung dengan Rumah Kemasan milik Disperindag Provinsi Kepulauan Riau. Layanan Rumah Kemasan Disperindag Provinsi Kepulauan Riau hendaknya diubah menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) agar UPTD tersebut dapat menarik retribusi dari setiap IKM dan dapat melanjutkan roda produksi sebagai bentuk kontinuitas layanan kemasan di Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan juga harus ditingkatkan dan hal tersebut membutuhkan peran konsultan-konsultan dan juga akademisi dalam membuat naskah akademik dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di atas.

4. Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama

Pada indikator Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan telah berupaya dengan memfasilitasi segala kerjasama pemasaran seperti Kurasi Alfamart, bazar produk, mempromosikan produk usaha mikro via *whatsapp*, dan sebagainya. Akan tetapi, Dinas terkait yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan belum memiliki satu sistem khusus yang dapat memasarkan produk usaha mikro Kabupaten Bintan secara lebih luas.

Peneliti menyarankan sebaiknya DKUPP Bintan juga turut membantu memfasilitasi pelaku usaha mikro di Bintan untuk dapat memasarkan produknya melalui situs belanja online (*e-commerce*). Pada saat ini, *e-commerce* ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro sangat terbuka

lebar mengingat daya jangkau *e-commerce* yang sangat luas karena dapat dijangkau oleh siapa saja.

5. Pembuatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Pelaku Usaha

Pada indikator Pembuatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Pelaku Usaha, peneliti temui bahwasanya Kabupaten Bintan belum memiliki Lembaga Penelitian dan Pengembangan ataupun pusat penelitian yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha di Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bintan membangun Pusat Penelitian yang dikhususkan bagi pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bintan.

Persaingan yang berkembang di dunia berbasis pengetahuan saat ini sangat membutuhkan penelitian berkelanjutan oleh para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mengembangkan produk baru, mengembangkan teknologi baru dan mencari pasar yang baru oleh karenanya dibutuhkan Pusat Penelitian bagi pelaku usaha di Kabupaten Bintan itu sendiri.

Sedangkan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu hendaknya dapat meneliti dan menelaah kembali mengenai masalah kemasam yang masih menjadi problematika di Kabupaten Bintan serta dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan yang masih belum berdiri di Kabupaten Bintan.

REFERENSI

- Annisa Fitri Pramono, D. A. (2020). Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 5(2), 7–21.
- Arsyad, L. (2009). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (edisi kedua). Yogyakarta: IKAPI.
- Dwi Mirani, Martina, J. E. A. (2021). Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 38–46.
- Fajar Febrian Putranto, Zhikry Fitriani, Bramantyo Adi Nugraha, Eka Nor Santi, Noor Wahyuningsih, Puput Wahyu Budiman, A. H. P. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa*, 1(1), 13–27.
- Mastur Mujib Ikhani, Selamat Eko Budi Santoso, Fatmah Bagis, A. H. (2021). Strategies For Increasing The Competitiveness Of Micro Small And Medium Enterprises (MSMEs) In Banyumas During The Covid-19 Pandemic. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (JEBAR)*, 5(3), 1912–1921.

Mohamad Nur Utomo, Lin Ariska, Sulistya Rini Pratiwi, K. (2021). Strategies for Maintaining SME's Performance During Covid-19 Pandemic. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 34–43.

Nyoman Tri Sutaguna, Syamsu Rijal, Chevy Herli Sumerli A, Geofakta Razali, M. Y. (2023). Micro, Small, and Medium Enterprises Digital Marketing Strategy in Cimekar Village, Bandung Regency. *Brilliant International Journal Of Management and Tourism*, 3(1), 184–197.